

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pariwisata adalah salah satu hal yang sangat penting bagi negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi Pemerintah Daerah tempat obyek wisata itu memberikan pendapatan secara khusus atau pemasukan bagi pendapatan daerah (Fandi, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang kemitraan pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu sektor pariwisata Indonesia menjadi sorotan. Industri pariwisata di Indonesia harus mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan pariwisatanya. Pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Sektor pariwisata dinyatakan sebagai salah satu pengaruh kuat dalam perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata.

Pariwisata Indonesia diharapkan mampu untuk berperan sebagai penentu dan katalisator mengembangkan pembangunan sektor lainnya secara bertahap yoeti (dalam Farrah, 2017). Indonesia memiliki 34 provinsi yang terdiri dari pulau-pulau, dimana setiap daerah memiliki potensi pariwisata yang memiliki daya Tarik tersendiri, salah satunya di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi pariwisata yang besar dan menawarkan berbagai obyek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Farrah, (2017) menyatakan dalam penelitian nya jawa

barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak jika dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang mampu memberikan potensi wisata yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengelolaan kegiatan pariwisata tentu sangat diperlukan dalam upaya menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak-banyaknya selama melakukan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya Wardana (2017). Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga dengan kota dan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya Tarik wisata.

Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan, maka terbentuklah 2 buah bentuk pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota (Portal.tasikmalayakota.2018). Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang sangat berdekatan dengan Kota Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak sekali potensi wisata, namun sayangnya beberapa destinasi wisata yang ada di wilayah ini belum dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal. Kota dan kabupaten Tasikmalaya mempunyai kurang lebih 40 destinasi wisata. Banyaknya objek wisata yang ada pengelolaan terhambat karena

kurangnya pemerhati pemerintah secara khusus untuk mengelola objek wisata tersebut.

Saat ini beberapa kawasan wisata yang sudah di kembangkan oleh pemerintah kabupaten maupun kota tasikmalaya, namun pengelolaan tersebut tidak untuk wisata alam kabupaten tasikmalaya yang kurang dari jangkauan masyarakat contohnya seperti curug atau air terjun yang kurang diperhatikan dan dikelola langsung oleh pemerintah. Pada halaman Republika.co.id (2018) disebutkan bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya sedang fokus untuk membenahi 3 destinasi wisata yang mereka miliki untuk mendunia, ke 3 destinasi wisata tersebut yaitu Kampung Naga yang menyuguhkan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal, Wisata Gunung Galunggung yang menyuguhkan wisata alam dan juga bisa dijadikan sebagai wisata edukasi (mempelajari letusan dan sejarah Gunung Galunggung), dan kemudian yang terakhir adalah objek wisata di pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya (salah satunya wisata Pantai Karangtawulan).

Tabel 1.1
Data Kunjungan Arus Wisatawan Yang Berkunjung Ke Gunung Galunggung
Kabupaten Tasikmalaya 2015 – 2017

No	Objek wisata	Tahun		
	Wana wisata	2015	2016	2017
1	Gunung Galunggung	241,813	235,293	373,159

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya (2018)

Dapat kita lihat dari data yang telah diperoleh dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, bahwa terjadi Penurunan kunjungan wisatawan ke Wana Wisata Gunung Galunggung dari tahun 2015 sampai 2016 sebanyak 6,52 dengan penurunan pertumbuhan kunjungan menurun

sebesar 0,42 persen , Namun terjadi kenaikan kunjungan wisatawan dari tahun 2016 menuju tahun 2017 sebanyak 137,866 dengan peningkatan pertumbuhan kunjungan sebesar 37.02 persen. Peningkatan tersebut disebabkan dengan adanya system perubahan tatakelola dan tercapainya target dari hasil pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung.

Dari penjelasan diatas maka dapat ketahui bahwa sangat penting pengelolaan sektor pariwisata. Maka itu perlu maksimal dalam pengelolaan tersebut maka dari itu juga harus dilakukan kerja sama atau kemitraan melalui pendekatan organisasi pariwisata yang ada yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait yang mendukung kelanjutan pembangunan di daerah itu Fandi, (2012) sesuai dengan yang di utarakan Putra, (2013) bahwa Kemitraan adalah konsep kerjasama yang memiliki kriteria seperti dilakukan atau dilaksanakan lebih dari satu pihak, mempunyai kebutuhan masing-masing, namun sepakat dalam mencapai visi dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas.

Gunung galunggung adalah salah satu objek wisata yang terletak di jawa barat, desa linggajati, kabupaten tasikmalaya. Jarak dari pusat kota tasikmalaya sekitar 17 km. Terdapat beberapa daya tarik tersendiri gunung galunggung menawarkan wanawisata dengan areal seluas kurang lebih 120 hektar di bawah pengelolaan Perum Perhutani dan Dinas Pariwisata dan Budaya (Mukhsi, 2015). Gunung galunggung ini memberikan pesona yang mankjubkan untuk wisatawan dengan keunikan puncak di suguhi danau yang sangat indah perbedaan dari gunung lainnya adalah danau yang berair tidak ber bau belerang seperti gunung lainnya. Obyek wisata gunung galunggung ini di tunjang wisata edukasi (mempelajari letusan dan sejarah Gunung Galunggung)

KOMPEPAR adalah salah satu unsur “masyarakat pariwisata” yang berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam hal ini adalah DISPARPORA dalam membangun dan mengembangkan dunia kepariwisataan. Dalam mekanisme kerjanya, masyarakat dan pemerintah memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Yakni pembangunan, terutama sektor pariwisata yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal dengan melibatkan dan mendayagunakan peran serta masyarakat daerah sekitar. Adapun tugas dari KOMPEPAR yaitu meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota.

Akan tetapi pengelolaan tersebut menjadi kontroversi besar terhadap pemerintah Kabupaten Tasikmalaya karena masih menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk membenahan retribusi agar tidak adanya pungutan liar, dan pemerintah kabupaten tasikmalaya berupaya untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pariwisata dengan menaikan tarif tiket masuk obyek wisata (validnews, 2018)

Tabel 1.2
Data Pendapatan Asli Daerah Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017

No	Wana Wisata	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Kawasan Wisata Galunggung	642.142.000	557.501.000	616.754.000
2	Bak Rendam Air Panas Galunggung	58.783.000	61.254.000	73.763.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya (2018)

Dapat dilihat data diatas bahwa adanya peningkatan jumlah pendapatan wisata pemandian air panas yang signifikan pada tahun 2015 hingga 2017. Namun juga terjadi penurunan pendapatan yang dialami oleh kawasan wisata Gunung Galunggung

pada tahun 2015 hingga 2016 sebesar 84.646.000 meskipun pada tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi jumlah dari tahun 2015 hingga 2017 sangat tipis angka kenaikan pendapatan yang merupakan dampak dari berkurangnya jumlah pengunjung seiring dengan di naikkannya tarif atau reribusi masuk ke wana wisata gunung galunggung pada tahun 2017.

Beragam fakta tersebut mengindikasikan bahwa kerjasama yang di terapkan belum mendukung penuh dalam pengembangan pengelolaan pariwisata di gunung galunggung. Dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan pariwisata di Kabupaten maupun di kota tasikmalaya antara Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga, Perhutani dengan Masyarakat salah satunya adalah Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) yang menjadi mitra resmi pemerintah dalam mengelola pariwisata.

Perlu untuk diketahui, berdasarkan data kabar priangan tahun 2017 Posisi daya saing pariwisata Kota/Kabupaten Tasikmalaya dibandingkan dengan pariwisata daerah Kota/Kabupaten lain bisa dikatakan masih di bawah atau rendah. Pasalnya konsep dan program unggulan pariwisata Kota/Kabupaten Tasikmalaya masih belum jelas arahnya ke mana dan pengelolaannya. Kabupaten maupun Kota Tasikmlaya mempunyai berbagai macam objek wisata alam maupun budaya apabila di kelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan objek wisata gunung galunggung yang dilakukan secara kemitraan (antara pemerintah kabupaten maupun PT.Perhutani dengan masyarakat

lokal) dapat memanfaatkannya sebagai pendongkrak dalam pembangunan daerah. Kemitraan ini menjadi penting, mengingat selama ini pembangunan yang dilakukan hanya menjadikan pemerintah kabupaten sebagai objek pembangunan saja (kabar priangan.ac.id.2016).

Kemitraan dapat terjalin atas dasar kebutuhan satu sama lain akan kemampuan yang tidak dimiliki dirinya, selain ada kepentingan masing-masing pihak yang hendak dicapai. Kemitraan yang terjalin biasanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat sipil atau stakeholder lain yang bisa membawa keuntungan maksimal bagi sebuah program. Dalam kemitraan tidak ada pihak yang sifatnya saling membawahi pihak lain, dasar komitmen bersama menjadi tanggungjawab bersama pula yang mewajibkan setiap pihak untuk memberikan input dalam penyusunan agenda kerja yang akan memunculkan kolaborasi good partnership jejaring antar pihak (Nugroho, 2014).

Sehingga dapat di lihat bahwa untuk menanggulangi permasalahan pengelolaan ini seharusnya di atur dalam perjanjian pengelolaan kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Perhutani dengan Masyarakat yang di kelompokkan menjadi jaringan masyarakat penggerak pariwisata atau KOMPEPAR serta KOPARGA (Koperasi Pariwisata Galunggung). Harapannya dapat menjaga dan melestarikan dengan adanya kemitraan dalam pengelolaan obyek wisata diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan wisata gunung galunggung. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat lokal yang berada di kawasan obyek wisata dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengetahui tentang bagaimana proses pengelolaan pariwisata Gunung Galunggung kemudian peneliti ingin mengetahui kemitraan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan PT Perhutani Jabar Banten dengan masyarakat dari pengelolaan tersebut yang berdampak terhadap wisatawan yang berkunjung di gunung galunggung dan meningkatnya terhadap Pendapatan asli daerah maka dari itu apakah sudah terkelola dengan baik atau belum bahkan apakah justru menimbulkan polemik permasalahan yang baru dalam pengelolaan tersebut. Maka dapat di tarik rumusan masalah yaitu :

Bagaimana Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Gunung Galunggung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Pariwisata di Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kemitraan dalam Pengelolaan Objek wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya yang di kelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya , Perhutani dengan Masyarakat.
3. Untuk Mengetahui Dampak dari Kemitraan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai kemitraan pengelolaan pariwisata yang berdampak pada Pendapatan asli daerah, terutama wisata pegunungan sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam kegiatan akademik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pengelola pariwisata di pegunungan lain dan khususnya bagi pengelola di gunung galunggung dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perekonomian masyarakat dan mengetahui pengelolaan pariwisata yang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan merupakan hal penting dalam suatu instansi maupun organisasi oleh karena itu banyak penelitian-penelitian mengenai pengelolaan maupun kemitraan pengelolaan pariwisata. Berdasarkan hal diatas penelitian yang pernah dilakukan baik berupa skripsi ataupun yang dimuat dalam jurnal biasanya menjadi bahan referensi bagi peneliti baru.

Muhammad (2015) menyatakan bahwa bentuk pengelolaan potensi pariwisata yang ada di pantai pangandaran menggunakan bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu masyarakat berperan penuh sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau maupun evaluator dalam pengelolaan pariwisata.

Beatrix (2017) menyatakan bahwa Pola Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi

Pariwisata di Sulawesi Barat belum berjalan dengan baik. Pada dasarnya baik itu Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun Masyarakat belum memahami dengan benar esensi kemitraan dan tujuan dari kemitraan itu bagi proses pembangunan Kepariwisataan. Penyebabnya antara lain yakni masih terdapat ego sektoral, rendahnya pemahaman, dan tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Putra (2013) menyatakan bahwa Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik pola kemitraan dalam manajemen atraksi di Desa Wisata Pampang, serta merumuskan perbaikan yang seharusnya diterapkan. Hasil penelitian didapatkan model kemitraan tergolong dalam kemitraan semu dan gabungan subordinatif. Pola kemitraan didominasi pola yang bersifat bantuan, meliputi Bantuan Dana Hibah baik fisik maupun program PNPM Mandiri Pariwisata, Investasi Swasta, CSR, Bantuan Pinjaman Dana Bergulir (KUD), Subkontrak dan Dagang Umum. Manajemen atraksi wisata kurang memberi ruang pengembangan SDM, terlalu membatasi aktivitas pariwisata dengan sosial budaya masyarakat, kurang memanfaatkan teknologi dan minim pengorganisasian komunitas.

Nugroho, (2014) menyatakan bahwa yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) itu adalah stakeholder Pengelolaan pariwisata akan terlaksana dengan baik apabila koordinasi yang intensif antara stakeholder ataupun instansi terkait. Temuan permasalahan-permasalahan yang di kelembagaan yang sering di hadapi, kurang nya koordinasi antara lembaga pemerintah , kurangnya pengawasan pada tingkat pelaksanaan dan juga terbatasnya personil di lapangan, maupun SDM di objek pariwisata yang belum banyak mendukung.

Hastuti, (2011) menyatakan bahwa kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD sebesar 3,51%, pada tahun 2006 sebesar 2,14%, pada tahun 2007 sebesar 3,39% tahun 2008 sebesar 4,03% dan pada tahun 2009 sebesar 4,25%. Laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata pada tahun 2006 sebesar -22,33%, tahun 2007 sebesar 53,33%, tahun 2008 sebesar 35,52% dan pada tahun 2009 sebesar 23,33%. Efisiensi pemungutan Retribusi Pariwisata pada tahun 2005 adalah 32,5%, tahun 2006 sebesar 52,7%, tahun 2007 sebesar 61,3%, pada tahun 2008 sebesar 59,1%, dan pada tahun 2009 sebesar 51%. Efektivitas pemungutan Retribusi Pariwisata pada tahun 2005 adalah sebesar 106,04%, tahun 2006 sebesar 85,05%, tahun 2007 sebesar 108,96% dan 129% pada tahun 2008 serta sebesar 125,99% pada tahun 2009.

Yuningsih, (2005) menyatakan bahwa faktor yang mendorong pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran adalah adanya daya tarik yang dimiliki oleh pantai Pangandaran, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menghambatnya adalah adanya faktor internal, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang, kurangnya kesadaran dari para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat, terdapatnya lahan tidur, abrasi pesisir pantai, kurang tertibnya pedagang kaki lima dan masih terbatasnya dana. Sedangkan faktor eksternal seperti adanya persaingan yang semakin ketat, krisis moneter, adanya pengaruh luar, kultur masyarakat yang kurang mendukung, kurangnya kesadaran wisatawan dan kurang sadarnya lembaga-lembaga swasta terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan.

Fandi dkk, (2012) menyatakan bahwa Dalam menanggapi masalah pengelolaan sektor pariwisata, bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab,

namun peran swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kemitraan dalam pengelolaan sektor pariwisata benar-benar tercipta di Kabupaten Jombang. kemitraan pengelolaan sektor pariwisata mengenai pemanfaatan lahan Tirta Wisata masih hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat promosi oleh pihak swasta.

Halsall dkk, (2013) menyatakan Bahwa Sejak krisis keuangan global tahun 2008 lembaga pemerintah harus mengubah pendekatan ke tata kelola masyarakat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk secara kritis mengeksplorasi perdebatan kontemporer tentang tata kelola masyarakat. Dua contoh studi kasus, yaitu: Inggris dan India telah diperiksa berkaitan dengan perubahan penyampaian tata kelola komunitas. Dalam makalah ini kami berpendapat bahwa persamaan dapat ditarik dari kedua studi kasus mengenai bagaimana fungsi organisasi masyarakat dan fasilitasi sumber daya mereka.

Totikidis, (2005) menyebutkan bahwa di Suatu model pemerintahan yang baru berkembang yang mendapatkan popularitas dalam sektor publik dan komunitas adalah Pemerintahan Komunitas. Konsep biasanya mengacu pada partisipasi masyarakat, keterlibatan dan pengambilan keputusan dalam hal-hal publik dan terkait dengan istilah-istilah seperti pemerintahan lokal, tata kelola sosial, tata kelola jaringan dan pemerintahan partisipatif. Kesimpulan utama adalah bahwa tata kelola masyarakat, menurut definisi, adalah tentang manajemen masyarakat dan pengambilan keputusan tetapi juga berimplikasi pada tujuan yang lebih luas dalam menangani kebutuhan masyarakat dan membangun kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Halsall, (2012) menyebutkan bahwa, ada banyak perdebatan yang menantang pendekatan yang diambil oleh Tenaga Kerja Baru dalam menangani pembagian sosial dan ekonomi di seluruh Inggris. Pengenalan Masyarakat Besar menciptakan wacana baru sehubungan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan lokal dan regional, yang menantang gagasan masyarakat. makalah ini memberikan diskusi analitis tentang munculnya bentuk-bentuk pemerintahan masyarakat yang baru dan khususnya demokratisasi ulang masyarakat di Inggris.

Cavaye, (2004) menyebutkan bahwa Tata kelola yang terlibat bukanlah kebijakan baru, melainkan "politik" baru - kumpulan hubungan dan interaksi baru antara agensi dan komunitas. Tata kelola yang terlibat baru, tidak ada "politik" baru - kumpulan hubungan dan interaksi baru antara agensi dan komunitas. Politik baru ini, bersama dengan proses pengembangan kapasitas di dalam lembaga dan dapat diandalkan sendiri. Nilai-nilai baru dapat menciptakan kebijakan dan struktur baru

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Jenis pengelompokan	Temuan hasil
1	Pola Atau Bentuk Kemitraan Pengelolaan Pariwisata	Muhammad (2015), Beatrix (2017), Putra (2013), Fandi dkk (2012) menjelaskan tentang pola atau bentuk kemitraan dalam pengelolaan pariwisata yang di jalan kan oleh pemerintah, ataupun swasta dengan melibatkan masyarakat.
2	Pengelolaan Pariwisata yang Berdampak pada PAD	Nugroho, (2014), Hastuti, (2011), Yuningsih, (2005) menjelaskan tentang bagaimana upaya pemerintah agar menjadikan sektor wisata yang berdampak terhadap Pendapatan Asli daerah, serta faktor pendorong dalam pengembangan wisata.
3	Tata Kelola Komunitas	Halsall dkk, (2013), Totikidis (2005), Halsall (2012), Cavaye (2004) menjelaskan bagaimana fungsi organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam kebijakan pemerintah.

Dari beberapa penelusuran yang peneliti lakukan, perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah dalam segi permasalahan kiprah kerja atau pengelolaan organisasi masyarakat dan pemerintah khususnya. Dimana pengelolaan pariwisata yang dikelola berdampak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah fakta lain adalah Naik turunnya Kunjungan memberikan fakta bahwa ada pengelolaan yang belum terorganisir maupun terkelola dengan baik. Objek peneliti tentang pengelolaan pariwisata, kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat khususnya di Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut. Dengan melakukan penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui Kemitraan Pengelolaan pariwisata di Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat yang memberikan Dampak terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2017.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Kemitraan

Kemitraan Secara Harafiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kemitraan berasal dari kata Mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka menjadi kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Putra (2013) menyebutkan bahwa Kemitraan adalah suatu konsep kerjasama yang memiliki kriteria seperti dilakukan lebih dari satu pihak, mempunyai kebutuhan masing-masing, namun sepakat mencapai visi dan tujuan

untuk meningkatkan kapasitas. Menurut Sulistyani (dalam Putra, 2013) , kemitraan dalam perspektif etimologis diadaptasi dari kata Partnership dan berasal dari akar kata partner, yang berarti “pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen”. Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan Tirta Wisata.
- c. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Tirta Wisata yang dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
- d. Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan Tirta Wisata.

Pendapat lain yang mengemukakan mengenai kemitraan yaitu mengenai model-model kemitraan yang di kemukakan oleh Notoadmojo, (dalam Putra, 2013) yaitu :

a. Model I

Model kemitraan paling sederhana adalah berupa bentuk jaring kerja (networking) atau building linkages. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.

b. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam :

a. SK Bersama

b. MOU

- c. Pokja
- d. Forum Komunikasi
- e. Kontrak Kerja/perjanjian kerja

Kemitraan menurut keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 menyatakan bahwa :

“Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling mempercayai antara perusahaan mitra dengan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya hubungan yang:

- 1) Saling membutuhkan, dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani, nelayan memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
- 2) Saling menguntungkan yaitu baik petani, nelayan maupun pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan/ keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha.
- 3) Saling memperkuat, dalam arti baik petani, nelayan maupun pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra.”

Ada macam-macam tujuan kemitraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menurut Hafsah (dalam Nurfadilah, 2017) kondisi sosial yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah

1. Meningkatkan pendapatan
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah
3. Meningkatkan efisiensi
4. Menciptakan pemeratan
5. Memperluas kesempatan kerja
6. Pemberdayaan masyarakat usaha kecil
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional.
8. Menghindari kecemburuan sosial yang akan menimbulkan gejolak sosial.

Adapun dasar pertimabangna diperlukannya kerjasama kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta menurut Utomo (dalam Beatrix, 2017)

1. Alasan politis yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya *good governance*.
2. Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset, dan kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko.

Atas dasar ketiga alasan tersebut di atas maka konsep kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan di daerah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan jalinan usaha yang merupakan strategi dalam pembangunan untuk tercapainya tujuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan prinsip membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang disertai adanya satu pembinaan dan pengembangan.

Menurut Kuswidanti (dalam Pebriani dkk, 2010) Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu di pahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota yaitu :

1. Prinsip Kesetaraan

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

2. Prinsip keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3. Prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing

kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan antara pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada satu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya suatu kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya Sulistiyani (dalam Nurfadilah, 2017)

Pelaksanaan dari hubungan kemitraan, dilakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan kondisi dan tujuan usaha yang di mitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasional nya. Dengan upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat di butuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Oleh karena itu di harapkan terukurnya mengenai tugas dan perannya dengan baik. Serta tercapainya sasaran pengembangan tersebut, prioritas yang akan di lalui adalah mengembangkan pariwisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kualitas pelayanan dalam kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh penerapan kemitraan yang di lakukan pemerintah dan masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 pasal 4 terdapat beberapa pola kemitraan yaitu:

- 1) “Pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi.
- 2) Pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- 3) Pola Dagang Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- 4) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- 5) Pola KOA sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian”.

Sulistiyani (2004) Berpendapat bahwa Pola kemitraan yaitu diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut :

1. Pseudo partnership atau kemitraan semu

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistic

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga

memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

2. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan dalam kamus besar bahasa indonesia di definisikan sebagai berikut :

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut terry (dalam Kanuna, 2014) pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan Terry dkk, (dalam Kanuna, 2014) juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas human and national resources (terutama human resources) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Kanuna (2014) Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan berikut penjelasan yang dikemukakan oleh Kanuna (2014) :

- a. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
- d. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Adapun pengertian mengenai pariwisata secara etimologis Pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan Wisata. Pari yang berarti ber ulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian jadi dapat disimpulkan bahwa Pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Saputro (2016) mengemukakan bahwa Pariwisata merupakan perpindahan sementara yang dilakaukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan/rutinitas sehari-hari, keluar dari kediamannya. Secara demikian pariwisata berarti dari kata pariwisata suatu perjalanan yang dilaakukan secara berkali-kali atau berputar-putar daru suatu tempat ke tempat lain.

Menurut definisi pengertian dari pariwisata yang di katakan oleh Spillane (dalam Nurfadilah, 2017) Menyebutkan bahwa pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorang maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Pariwisata menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oelh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pengertian yang lain Suwanto (dalam Beatrix, 2017) menyebutkan bahwa pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain keluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergian adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk kegiatan menghasilkan upah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 1, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Menurut Leiper (dalam Beatrix, 2017) ada tiga elemen utama menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni :

1. Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

2. Elemen geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi, seperti berikut :

- a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan.
- c) Daerah Tujuan Wisata (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga merupakan *raison d'etre* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

3. Industri Pariwisata

Elemen ke tiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata.

Industri yang menyediakan jasa, daya tarik dan sarana wisata.

Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga geografi tersebut. Contoh biro perjalanan wisata bisa di temukan di daerah asal wisatawan.

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.
- b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. Tujuan kepariwisataan meliputi:
 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 3. Menghapus kemiskinan
 4. Mengatasi pengangguran
 5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
 6. Memajukan kebudayaan
 7. Mengangkat citra bangsa
 8. Memupuk rasa cinta tanah air
 9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
 10. Memperat persahabatan antar bangsa

Menurut Beatrix (2017) menyebutkan pariwisata mempunyai macam-macam bentuk kegiatan yang dapat di selaraskan dengan minat ataupun kebutuhan wisatawan. Kegiatan wisatawan tersebut memiliki tujuan tertentu yang mendatangkan manfaat tersendiri bagi wisatawan. Menurut Suwantoro (dalam Beatrix, 2017) terdapat beberapa macam perjalanan wisata jika dilihat dari berbagai macam segi, yaitu :

1. Segi jumlahnya, wisatawan di bedakan menjadi :
 - a) Individual Tour (wisatawan Perorangan), Yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang.
 - b) Family group (wisata keluarga) yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 - c) Group Tour (wisata rombongan) suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan di pimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan anggotanya.
2. Segi Kepengaturannya, wisata di bedakan menjadi
 - a) Pra-arranged Tour (wisata berencana) yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur atau di rencanakan segala sesuatunya, baik transportasi, objek-objek, mauoun akomodasi yang di butuhkan ketika berwisata.
 - b) Package Tour (paket wisata) yaitu perusahaan biro perjalanan wisata yang telah bekerja sama menyelenggarakan paket wisata yang mencakup biaya perjalanan serta fasiliytas yang di butuhkan yang merupakan suatu

komposisi dalam perjalanan yang di susun guna memberikan kemudahan bagi wisatawan.

- c) Coach Tour (wisata terpimpin), yaitu suatu paket perjalanan ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang dilakukan secara rutin, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu pula.
- d) Special Arranged Tour (wisata khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai keinginannya. Optional Tour (wisata tambahan), yaitu suatu perjalanan wisata tambahan di luar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, yang dilakukan atas permintaan pelanggan.

3. Segi penyelenggarannya, wisata dibedakan atas:

- a) Ekskursi (Excursion), yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata.
- b) Safari Tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek wisata pada umumnya.
- c) Cruise Tour, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat dengan menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya.

d) Youth Tour (wisata remaja), yaitu kunjungan wisata yang diselenggarakan khusus bagi para remaja menurut golongan umur yang ditetapkan negara masing-masing.

e) Marine Tour (wisata bahari), yaitu suatu kunjungn ke objek wisata khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan wreck-diving (menyelam) dengan perlengkapan selam lengkap.

Jenis-jenis wisata ini muncul dikarenakan di setiap daerah maupun suatu negara umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata agar dapat menarik perhatian pengunjung wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Dari hal tersebut maka terdapat berbagai jenis pariwisata menurut Marpaung (dalam Abdul, 2015) yaitu :

1. Wisata untuk menikmati perjalanan :

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mendapatkan ketenangan di luar kota dan sebaliknya.

2. Wisata untuk rekreasi :

Jenis wisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari libur untuk beristirahat, melepaskan segala keletihan dan kelelahan, dengan mengunjungi tempat yang dianggap menjamin tujuan rekreasi mereka, seperti tepi pantai, pegunungan, dan tujuan untuk menemukan kenikmatan mereka.

3. Wisata untuk Kebudayaan:

Jenis wisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat riset, mempelajari adat istiadat, dan mengunjungi monumen bersejarah.

Pengelolaan Pariwisata merupakan bagian penting dalam kegiatan pariwisata, tanpa pengelolaan pariwisata tentu tidak akan terciptanya sapa pesona yang akan menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Cox (dalam Amim, 2017), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika

melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang diurikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen masyarakat. Metode Pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan berikut WTO, dalam Richardson dan Fluker (dalam Amim, 2017) :

1. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan

Hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industry pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dalam subjek tertentu, penjajakan dan survai, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok kepentingan, dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.

2. Pengidentifikasian isu

Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan.

3. Penyusunan Kebijakan

Kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.

4. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus

Agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategi sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata.

5. Penyediaan fasilitas dan operasi

Pemerintah berperan dalam member modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi dalam jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pariwisata.

6. Penyediaan Kebijakan fiscal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif.

Hal ini terutama diperlukan sebagai prasyarat bagi organisasi / perusahaan untuk mencari keuntungan atau target perusahaan yang telah ditetapkan.

7. Penyelesaian konflik kepentingan dalam Masyarakat

Hal ini merupakan peran yang sulit tetapi akan menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam era di mana isu lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu penting.

Dari prinsip-prinsip yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan sinergi atau kerja sama yang baik, konsistensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan berjalan lancar dan potensi-potensi yang dimiliki dapat di manfaatkan demi kebaikan bersama. Selain itu juga pengelolaan pariwisata sebaiknya memperhatikan kondisi lingkungan seperti menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaannya, karena tujuan awal dari pembangunan pariwisata adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Community governance

Pemerintah daerah telah memiliki hubungan yang panjang dengan proses komunitas yang kompleks pemerintahan. Munculnya konsep telah dipengaruhi oleh kecenderungan geografis dari istilah 'komunitas' (Delanty 2003) dan 'pemerintahan' yang berarti struktur pemerintahan baru.

"Perluasan gagasan pemerintah daerah di luar peran tradisionalnya dalam pengiriman layanan untuk mencakup lebih luas dalam 'mengatur' semua aspek dari komunitas lokal. Ini menyiratkan pergeseran penekanan untuk otoritas lokal dari administrasi publik menuju politik kepemimpinan dalam masyarakat sipil. "

Model pemerintahan yang sedang berkembang mendapatkan popularitas dalam masyarakat dan komunitas sektor adalah Community Governance. Tata kelola komunitas kadang-kadang digunakan untuk merujuk partisipasi masyarakat, keterlibatan dan pengambilan keputusan dalam masalah publik dan terkait dengan istilah-istilah seperti pemerintahan lokal, tata kelola sosial, tata kelola jaringan dan partisipatif pemerintahan (Halsall et al., 2013).

Bourne dkk (dalam Totikidis, 2005) Tata kelola komunitas adalah konsep penting yang perlu klarifikasi lebih lanjut. Sebuah studi tentang tata kelola komunitas pencegahan kejahatan dan keselamatan masyarakat. Dengan contoh di Victoria, baru-baru ini manfaat dari konsep tata kelola komunitas yang dilakukan oleh Universitas Victoria dalam kemitraan yaitu Pencegahan Kejahatan Victoria.

Komunitas adalah kelompok yang menganggap dirinya memiliki ikatan yang kuat dan langgeng, terutama ketika kelompok itu berbagi lokasi geografis. Satu ukuran masyarakat adalah partisipasi reguler oleh individu dalam kegiatannya. Yang lainnya adalah kekuatan identifikasi di antara anggota dengan ikatan sosial

yang dirasakan kelompok. Yang ketiga adalah ruang fisik spesifik dan lokasi yang umumnya dipahami sebagai wilayah grup. Ruang ini menyediakan set penanda materialnya sendiri komunitas memiliki ikatan emosional yang kuat Gottdiener and Budd (dalam Halsall et al., 2013)

Goodwin (dalam Halsall, 2012) Mengenai tentang literature komunitas memiliki hubungan yang panjang dengan teori grup dan jaringan kebijakan. Selain itu perdebatan tentang istilah komunitas telah menggariskan jalur yang jelas dalam kemajuan lembaga-lembaga politik.

Tujuan dari community governance adalah untuk membangun dan memelihara identitas kolektif di dalamnya otoritas lokal (lihat Gambar 1.3). Banner (dalam Halsall, 2012) telah mendefinisikan tata kelola komunitas sebagai:

Tabel 1.4

Tata Kelola Komunitas secara singkat dari Pendekatan Tenaga Kerja Baru

- “Peran kepemimpinan masyarakat dari dewan dan dunia komunitas yang rumit pemerintahan bukanlah hal baru. Kebijakan pemerintah sekarang membawa mereka ke tengah panggung, menyoroti hubungan kompleks antara organisasi sektor publik, sukarela dan swasta dengan warga negara dan komunitas
 - Kepemimpinan masyarakat dapat melibatkan pengembangan visi untuk lokalitas, bekerja di dalamnya kemitraan untuk mewujudkan visi tersebut dan menjamin layanan berkualitas untuk semua.
- Baru pendekatan dan cara kerja baru diperlukan agar dewan menjadi efektif dalam hal ini.
- Proses perencanaan dan kemitraan masyarakat dan cara-cara inovatif untuk melibatkan warga dan masyarakat akan dibutuhkan karena otoritas lokal menjadi lebih terbuka dan tampak luar.
 - Perubahan ini akan membuat tuntutan baru pada anggota dan petugas terpilih. Berbeda

hubungan, lebih menekankan pada jaringan dan broker dan keterampilan baru dan kompetensi akan dibutuhkan.

- Struktur dan proses politik dan mesin petugas dari pemerintah lokal tumbuh untuk mendukung manajemen dan pengiriman layanan. Kekhawatiran yang lebih luas dari kepemimpinan komunitas dan tata kelola komunitas akan mengubahnya. ”

Ini menggambarkan hubungan antara ‘Komunitas’ dan ‘Pemerintahan.’ Bowles and Ginitis (dalam Halsall, 2012) berpendapat bahwa konseptualisasi tata kelola komunitas mengakui bahwa:

Komunitas adalah bagian dari tata pemerintahan yang baik karena mereka mengatasi masalah tertentu yang tidak bisa ditangani oleh individu yang bertindak sendiri atau oleh pasar dan pemerintah. Ini kemudian menyoroti poin-poin awal dalam makalah tentang keterkaitan dalam Komunitas dan Pemerintahan.

Smith et al (dalam Totikidis, 2005) telah mendefinisikan istilah Pemerintahan sebagai 'kombinasi aturan, proses dan struktur dalam operasi untuk mengamankan 'aturan pesanan' secara kompleks dan terfragmentasi masyarakat, termasuk penentuan tujuan kebijakan utama, dan desain dan penyampaian yang terkait kebijakan, program, dan layanan. 'Salah satu kritik utama dari tata kelola masyarakat adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Keterlibatan komunitas adalah komunikasi timbal balik dan musyawarah yang terjadi antara pemerintah dan warga negara. Ini memungkinkan warga dan pemerintah untuk berpartisipasi bersama dalam perumusan kebijakan dan penyediaan layanan pemerintah, tetapi seringkali dengan final tanggung jawab

berbohong dengan pemerintah terpilih OECD (dalam Totikidis, 2005). Idealnya tautan itu tindakan pemerintah dengan aksi komunitas untuk kemajuan komunitas dan tujuan pemerintah. Berbagai pengaturan, struktur, dan proses dapat memediasi interaksi ini.

Keterlibatan komunitas selalu berarti partisipasi dengan komunitas orang-orang, daripada seorang warga negara. Ini berarti bahwa pengaturan keterlibatan perlu menggabungkan keragaman dan dinamika komunitas, masalah komunitas representasi dan kekuasaan, dan tujuan komunitas sub komunitas yang berpotensi bertentangan.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun tata kelola komunitas adalah yang pertama tentang komunitas manajemen dan pengambilan keputusan konsep pemerintahan masyarakat juga berimplikasi pada tujuan yang lebih luas dalam menangani kebutuhan masyarakat dan membangun kapasitas komunitas.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul halim (dalam Lestari sri, 2014) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD

adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Ahmad yani (dalam Lestari sri, 2014) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Lestari sri , 2014) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah perwujudan asas desentralisasi. Dapat di ambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil asli dari kekayaan murni yang di kelola daerah atau kekayaan daerah yang meliputi atau bersumber dari pajak, hasil retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 6 Undang- Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Abdul halim (dalam Lestari sri, 2014) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis Pendapatan yaitu :

1) Pajak Daerah

a) Pajak Provinsi, terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan pajak parkir.

2) Retribusi Daerah, Terdiri dari :

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perjanjian tertentu.

3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu :

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Dari jenis pajak, Kabupaten atau kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah di tentukan apabila pajak daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai.

Adapun penjelasan dari ketujuh jenis pajak kabupaten atau kota sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau kesamaan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Pasal 2 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000)

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Menurut Ibnu syamsi (dalam Yuningsih, 2005) mendefinisikan bahwa retribusi ialah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan di tunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak.

Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi dibagi tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi jasa umum
Jasa yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- b. Retribusi Jasa Usaha
Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai

atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah

c. Retribusi Perijinan tertentu

Perijinan tersebut termasuk kewenanga pemerintah yang di serahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000)

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu dimaksudkan untuk tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan di sesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk mengelolan perusahaan sendiri sebagai sumber pendapatannya yang disebut perusahaan daerah (perusada) (Yuningsih., 2005) menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat professional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien.

Salah satu tujuan atau maksud dari didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian bukan berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak di tunut untuk mnyelenggarakan fungsi-fungsi social, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu keuntungan dan kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan yang dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus di setorkan kepada kas daerah diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten/kota melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber Pendapatan asli daerah (PAD) tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat. (Yuningsih Nining, 2005)

G. Definisi Konseptual

Dengan beberapa konsep yang sudah di uraikan dalam hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian di susun definisi konseptual yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kemitraan merupakan suatu konsep kerjasama yang memiliki kriteria seperti dilakukan lebih dari satu pihak, mempunyai kebutuhan masing-masing, namun sepakat mencapai visi dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas.
2. Pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

3. Pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorang maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.
4. Community governance (tata kelola komunitas) merupakan tentang komunitas manajemen dan pengambilan keputusan konsep pemerintahan masyarakat juga berimplikasi pada tujuan yang lebih luas dalam menangani kebutuhan masyarakat dan membangun kapasitas komunitas.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Definisi operasional

Berdasarkan data serta teori yang sudah di paparkan secara empiris maka konsep tersebut harus di definisikan dengan cara mengubah menjadi variabel. Maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian yang di operasionalkan melalui variabel serta indikator sebagai berikut :

TABEL 1.5
Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Parameter
kemitraan dalam pengelolaan pariwisata di objek wisata gunung galunggung	Prinsip kesetaraan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Perhutani dan Masyarakat yang terlibat langsung dengan pengelolaan pariwisata bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama sejajar kedudukannya dalam mencapai tujuan yang disepakati melalui : a. Koordinasi Kemitraan b. Sistem Monitoring

kabupaten tasikmalaya	Prinsip Keterbukaan	Saling terbukanya terhadap kelebihan dan kekurangan antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Perhutani dan Masyarakat yang terlibat langsung dengan pengelolaan pariwisata melalui : a. Transparansi Kegiatan pengelolaan Pariwisata b. Hasil kegiatan pengelolaan (Pelaporan)
	Prinsip Azas manfaat bersama	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Perhutani dan Masyarakat yang terlibat langsung dengan pengelolaan pariwisata memperoleh manfaat selama terjalinnya kemitraan, melalui : a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dan Pihak Mitra b. Manfaat bagi PT.Perhutani dan Pihak Mitra
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Retribusi daerah	Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan pariwisata yang dikelola secara kemitraan antara pemerintah kabupaten, perhutani dengan masyarakat melalui : a. Arus Kunjungan wisata b. Realisasi target Pendapatan Asli Daerah
		Retribusi jasa umum melalui pengelolaan kepariwisataan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

I. Metode Penelitian

Dalam metode terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu dengan cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menciptakan data untuk tujuan dan kegunaan pada penelitian. Metode penelitian biasanya digunakan untuk merancang pekerjaan yang akan dilaksanakan sebelumnya, ketika, dan sesudah pengumpulan data secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleng (2007), penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian untuk memahami tentang apa yang dialami oleh suatu subjek penelitian sebagai contoh perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Teori dalam penelitian kualitatif diposisikan sebagai sesuatu yang akan diciptakan. Penelitian kualitatif berupaya untuk menciptakan teori baru dari pada menguji kebenaran sebuah teori. Dalam manfaat analisis kualitatif, ada arti pemahaman yang dimana peneliti kualitatif berupaya untuk memahami bagaimana individu memaknai atau mendefinisikan gejala sosial atau obyek yang berada didalam ataupun diluar. Sehingga dalam penelitian kualitatif tidak berupaya mencari hubungan antara gejala sosial yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data penelitian dengan mencermati tulisan-tulisan mengenai Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah dan Masyarakat, serta memahami percakapan informan, mencermati dan membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang dijawab oleh peneliti eksplorasi data dominan memakai metode wawancara dengan orang-orang terdekat objek penelitian untuk mengeksplorasi pengalaman, pendapat serta pandangan terhadap objek penelitian yang meliputi pengalaman informan selama mengelola pariwisata antara masyarakat dan pemerintah daerah pendapat informan terkait dengan pengelolaan pariwisata tersebut. Jadi dapat disimpulkan, penelitian dengan metode tersebut dapat menghasilkan suatu data deskriptif mengenai Kemitraan dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat Di Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Objek Wisata Gunung Galunggung Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan yang menjadi titik pengambilan data penelitian yaitu Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Perhutani dan Masyarakat (Kompepar dan Koparga) yang berada disekitar Gunung Galunggung.

3. Sumber Data

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat Di Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. Berikut data Primer dalam penelitian.

Tabel 1.6
Data Primer Penelitian

No	Nama data	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1	Kemitraan pengelolaan pariwisata	Langkah-langkah pembuatan kesepakatan pengelolaan pariwisata.	Dinas terkait dan Masyarakat	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		Implementasi kemitraan Pengelolaan pariwisata		
2	Pengelolaan (Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata)	Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pariwisata. Pengaruh masyarakat dalam proses pengelolaan pariwisata.	Dinas terkait dan Masyarakat	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
3	Pendapatan Asli Daerah	Dampak dari kemitraan melalui Retribusi daerah yaitu meningkatnya PAD (Gunung Galunggung)	Dinas terkait	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku, atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, laporan, yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan Kemitraan dalam pengelolaan pariwisata Antara Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat Di Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. Berikut data sekunder dalam penelitian

Tabel 1.7
Data Sekunder Penelitian

No	Nama data	Sumber
1	Surat Keputusan (sk) atau M.O.U kemitraan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Perhutani dan Masyarakat yang terlibat langsung dengan pengelolaan pariwisata
2	Arsip Data Pengelolaan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Perhutani dan Masyarakat yang terlibat langsung dengan pengelolaan pariwisata
3	Artikel, jurnal, berita terkait dengan pengelolaan pariwisata	Pihak ketiga

4. Unit Analisis Data

Sehubungan penelitian ini mengkaji tentang kemitraan pengelolaan pariwisata maka unit analisis data dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga , Perhutani dengan Masyarakat yang bertempat di sekitaran objek wisata Gunung Galunggung Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

5. Teknik pengumpulan data

Sugiono, (2015) Menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai sumber data penelitian dengan menelaah dan menganalisis data-data sekunder dari laporan penelitian, jurnal, buku, Koran, *website*, maupun berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kemitraan dalam Pengelolaan Pariwisata antara Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat di Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

b) Wawancara

Basrowi (dalam Muhammad, 2015) Wawancara yang dimaksud adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal respon yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasar dari pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka dan mengadakan Tanya jawab kepada informan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Perhutani, dan masyarakat serta Masyarakat yang berada di kawasan Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1.8

Tabel Informan

No	Kategori Informan	Keterangan
1	Instansi	
	a. Seksi kerja sama dan kemitraan	<i>Key Informan</i>
	b. Bagian lapangan UPT DISPARPORA Kabupaten Tasikmalaya.	<i>Key Informan</i>
	c. Staf Lapangan PT Perhutani Jabar Banten Unit III	<i>Key Informan</i>
	d. Seksi Ekonomi Kreatif	<i>Secondary Informan</i>
2	Steakholder	
	a. Kepala bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif DISPARPORA Kabupaten Tasikmalaya	<i>Secondary Informan</i>
	b. Kepala Seksi Kemitraan DISPARPORA Kabupaten Tasikmalaya	<i>Secondary Informan</i>
	Masyarakat	
	a. Mitra Kerja PT.Perhutani (Staf lapangan Koperasi pariwisata Galunggung)	<i>Key Informan</i>
	b. Mitra Kerja DISPARPORA (Ketua Kelompok Penggerak pariwisata)	<i>Key Informan</i>
	c. Pelaku usaha Objek wisata Gunung Galunggung	<i>Secondary Informan</i>
	d. Masyarakat sekitar	<i>Secondary Informan</i>

c) Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan Basrowi (dalam Muhammad, 2015). Dalam teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, map, CD, file, foto, arsip, dan lain sebagainya. Melalui teknik

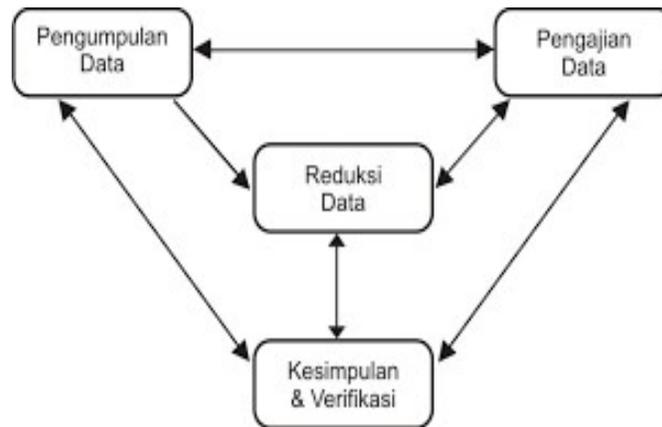
dokumentasi ini akan diamati fenomena dari objek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Hadi (1986) Setelah data diperoleh melalui wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara induktif terhadap data yang ada. Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Mengenai Kemitraan dalam pengelolaan pariwisata antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Perhutani, dengan Masyarakat di Objek Wisata Gunung Galunggung yang berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang di peroleh dari berbagai sumber akan di analisis secara mendalam dengan logika dan disikapi dengan akal sehat tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya yang berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga akan diketahui kemitraan dalam pengelolaan pariwisata antara Pemerintah, Perhutani dengan Masyarakat yang berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif
(interactive Model)



Sumber : diadopsi dari Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Panji Trisula, 2015)

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian

b) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan metode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c) Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

d) Matrik Kesimpulan

Pada tahap peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah di reduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai.